



Sosialisasi *E-Government* bagi Perangkat Desa Tontoauan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai

Kisman Karinda¹ dan Erwin Nursin²

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Luwuk

E-mail Korespondensi: kismankarinda35@gmail.com¹, erwinnursin75@gmail.com²

Abstrak

Perangkat desa adalah ujung tombak bagi pelayanan terhadap masyarakat di tingkat desa maka dari itu pengembangan kapasitas wajib untuk dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan kerja pelayanan terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa, perlu ditopang kelembagaan, pemahaman keuangan desa yang tertib dan infrastruktur desa serta pelayanan yang terintegrasi dalam *E-Government* tersebut diperlukan bagi aparatur pemerintah desa yang mampu dan memiliki kapasitas. Permasalahan yang ditemukan di Desa Tontoauan adalah masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam stuktur kelembagaan yang belum mengaktifkan beberapa komponen lembaga pemberdaya desa seperti karang taruna dan lembaga perhimpunan pemuda desa. Permasalahan selanjutnya ialah tata kelola pemerintahan yang belum memadai serta pemahaman dan aplikasi terhadap *e-Government*ang belum dimiliki dan dilaksanakan oleh perangkat desa. Metode penelitian yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan program dilakukan dengan metode sosialisasi, diskusi, tanya jawab, dan tes tertulis (kuesioner). Hasil evaluasi memperlihatkan rata-rata perubahan kemampuan dan pengetahuan aparatur desa sebesar 3.5 dengan nilai tingkat kepuasan selama mengikuti kegiatan sebesar 40-50% merasakan sangat puas dengan program ini.

Kata Kunci: sosialisasi, e-government, perangkat, desa

PENDAHULUAN

Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menjadi pijakan Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya undang undang ini membuka peluang dan memberi harapan baru bagi desa untuk lebih maju, mandiri, dan demokratis. Substansi undang undang ini akan tercapai apabila kualitas individual aparat desa mampu menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan mendudukkan partisipasi masyarakat secara terbuka dalam proses-proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Agustina, 2019). Responsivitas pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan adanya kewenangan desa. Menurut (Antlöv, 2003) dalam (Ilham Zitri, Rifaid, Darmansyah, Ayatullah Hadi, 2022) menjelaskan bahwa Kewenangan tersebut menjadikan desa dalam pengambilan keputusan tidak lagi menunggu persetujuan dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi Kewenangan



tersebut menjadikan desa dalam pengambilan keputusan tidak lagi menunggu persetujuan dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban atas aset dan sumber daya yang dimilikinya. Melalui kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki tersebut, desa akan lebih dapat menghimpun sumberdayanya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Proses pembangunan yang ada di desa sudah sepatutnya melibatkan seluruh kepentingan yang ada di desa secara partisipatif. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat harus dijadikan sebagai dasar pijakan dalam perumusan pembangunan desa. (Setiadi, Ekawati and Habib, 2020)

Akan tetapi ternyata implementasi UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan ditingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Salah satu penunjang dalam pelayanan masyarakat yang harus dimiliki oleh perangkat desa adalah pengetahuan akan E-Government. (Akbar Indrawan Saudi^{1*}, Taufik Hidayat B.2, 2020). Namun itupun terkendala factor sumberdaya manusia perangkat desa sehingga sampai saat ini khususnya di Desa Tontauan belum menerapkan E-Government.

Hasil survei awal di lapangan ternyata perangkat desa ketika mendengar *E-Government*, maka yang muncul dalam benak mereka pada umumnya adalah aplikasi-aplikasi, jaringan internet pemerintah atau mungkin website pemerintah. Kebanyakan diantara perangkat desa berpendapat bahwa E-Government itu adalah hal-hal teknis berbau teknologi informasi, padahal E-Government memiliki konsep yang lebih luas dari sekedar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saja. Secara konseptual, pengertian E-Government yang di rumuskan oleh Bank Dunia sebagai pemrakarsa digunakannya TIK oleh pemerintah dalam menjalankan birokrasi pemerintah adalah pemanfaatan Teknologi informasi oleh pemerintah untuk merubah pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta atau lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. (Sosiawan, 2008)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami berinisiatif sebagai langkah pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan sosialisasi e government bagi perangkat desa di Desa Tontauan Kecamatan Luwuk. Kegiatan yang kami lakukan ini tidak lain adalah untuk memberikan pengetahuan dan Pemahaman kepada Perangkat desa dalam rangka pengelolaa Pemerintahan berbasis Teknogi.

METODE PELAKSANAAN

Program sosialisasi dilaksanakan di Desa Tontauan Kecamatan Luwuk. Dasar pemilihan lokasi tersebut karena desa Tontauan adalah salah satu dari dua desa yang ada di kecamatan Luwuk yang keseluruhan yang notabene kesemuanya dalam berstatus kelurahan dan berada di



pusat kota, karena sangat ironi jika ada desa yang secara administratif berkedudukan di tengah kota dan belum memahami program *E-Government* maka melalui serangkaian *assessment* awal, diputuskan bahwa materi sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari aparat desa yang bersangkutan. Kebutuhan dan keinginan digali melalui kegiatan *assessment* yang dilakukan sebelum implementasi program sehingga desain program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan *assessment* tersebut bertujuan untuk menjangkau dan menggali informasi terkait dengan kebutuhan dan keinginan aparat desa, yang berkaitan pemahaman perangkat desa mengenai *E-Government*.

Metode pengabdian yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan program dilakukan dengan metode sosialisasi, diskusi, tanya jawab, dan tes tertulis (kuesioner). Kegiatan berlangsung dalam kurun waktu lima hari dengan peserta sebanyak 27 orang dari aparatatur dan perwakilan masyarakat.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Konsolidasi tim dan perencanaan awal kegiatan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menyusun materi sosialisasi dalam menjawab kebutuhan permasalahan yang ada di lapangan. Hasil penyusunan materi program diharapkan mampu membangun paradigma berfikir perangkat desa tentang pemahaman *e-government* yang nantinya akan berpengaruh terhadap tata kelola kelembagaan desa, pengelolaan keuangan desa serta aset desa dan infrastuktur desa.

Adapun materi sosialisasi merujuk pada manfaat *E-Government* yaitu sebagai sebuah mekanisme modern (interaksi baru) dari Pemerintah dan masyarakat dari Stakeholder lainnya yang bersangkutan yang mana memakai teknologi informasi (khususnya internet) bertujuan sebagai perbaikan mutu (Kualitas) pelayanan publik. Sejalan dengan Anwar (dalam Salahudin, 2016) menjelaskan tujuan dari penerapan *E-Government* bagi pemerintah (terutama pemerintah desa) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Materi Sosialisai Perangkat Desa Tentang *E-Governement*

1. *E-Government* dapat menciptakan hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah
2. Melalui penerapan *E-Governement* dapat Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.
3. Dengan *E-Government* menunjang implementasi *good governance*.
4. *E-Government* dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

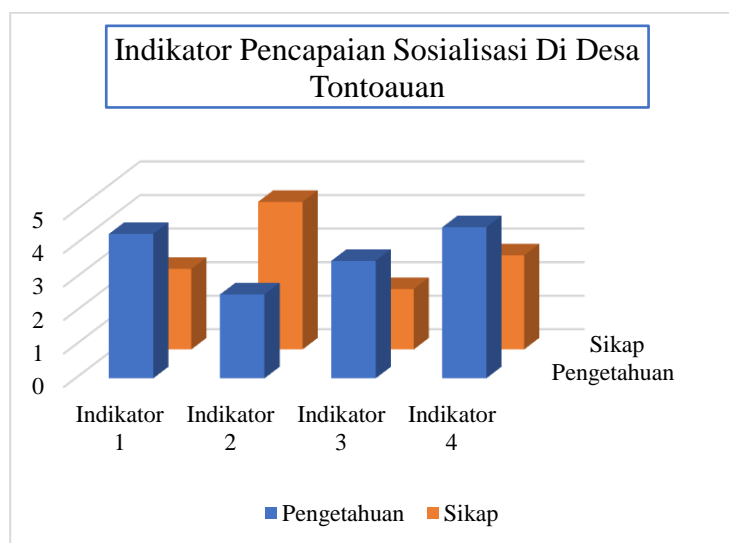
Pelaksanaan kegiatan dilangsungkan dengan melakukan konsolidasi bersama tim pengajar yang berkompeten pada masing-masing bidang sesuai dengan materi yang telah disusun pada tahapan konsolidasi dan perencanaan. Pelaksanaan sosialisasi di lapangan dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan, dan berlokasi di kantor Desa Tontouan selaku mitra pengabdian masyarakat.

Tahapan evaluasi yaitu melakukan penyusunan capaian indikator yang akan berikan kepada peserta untuk melihat peningkatan perubahan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Dalam proses menentukan capaian indikator yang dilakukan yaitu dengan melakukan penilaian langsung di lapangan terhadap sejauh mana penyerapan pengetahuan perangkat Desa Tontouan terhadap *E-Government*

Tabel 2. Indikator Kegiatan Sosialisai Pengabdian Masyarakat Desa

1. Perangkat desa mengetahui bahwa <i>E-Government</i> dapat menciptakan hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
2. Perangkat desa mengetahui bagaimana penerapan <i>E-Government</i> dapat Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.
3. Perangkat desa mengetahui <i>E-Government</i> dapat menunjang implementasi <i>good governance</i> .
4. Perangkat desa mengetahui <i>E-Governemen</i> dapat Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

Melihat Tabel 2 di atas, kegiatan yang menjadi indikator yang akan menjadi pencapaian dalam kegiatan sosialisasi Perangkat Desa Tontouan. Hasil penyusunan indikator ini merupakan target dalam mengukur efektivitas pelaksanaan sosialisasi terkait permasalahan. Pengabdian masyarakat maka yang dievaluasi yaitu pengetahuan, dan sikap yang kedepannya akan mendukung terciptanya urusan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berasaskan *Good Governance* serta *Clean Governance*. Pengukuran dilakukan cara memberikan ujian tertulis dan metode tanya jawab secara langsung kepada peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan. Hasil pemantauan evaluasi dari indikator-indikator yang ada disajikan dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. Grafik Pencapaian Sosialisasi di Desa Tontouan

Penilaian yang dilakukan di lakukan pada ahir sosialisasi didapatkan hasil yang menunjukkan kemampuan pemahaman dan sikap dari para perangkat desa rata-rata sebesar 3,5 terkait indikator indikator yang menjadi acuan dalam pemahaman mengenai *e-government* sebagai alat bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan para pemahaman perangkat desa sudah mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman dibandingkan dengan sebelum melaksanakan sosialisiasasi walaupun bahwa pada tingkat aplikasi perlu dilakukan pendampingan lanjutan untuk menindaklanjuti tahapan sosialisasi ini

Proses penilaian selanjutnya dilakukan dengan mengukur *satisfaction index* yang dilakukan kepada para perangkat desa Desa Tontouan dengan melakukan survei kepuasan dengan menggunakan kuisisioner untuk melihat seberapa jauh tingkat kepuasan setelah pelaksanaan sosialisasi dalam menjalani program penguatan yang diberikan selama kurun waktu tertentu. Perangkat desa diminta mengisi kuisisioner dengan menjawab beberapa pertanyaan dengan ukuran skala tertentu dan alasan memilih jawaban tersebut, hal ini akan memperlihatkan pengukuran nilai kepuasan yang dapat dikuantifikasikan dengan skala tertentu. Alasan yang diberikan dikategorikan untuk mencegah terjadinya jawaban yang tidak rasional. Hasil dari penilaian pengukuran kepuasan perangkat desa dalam pelaksanaan sosialisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Diagram Tingkat Kepuasan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Sosialisasi

Penilaian dari hasil survei kepuasan penyelenggaraan program Pengabdian masyarakat yang dikemas dalam bentuk sosialisasi *E-Government* di desa Tontoauan yang dilakukan dihasilkan seperti pada pie chart yang ada diatas . Penilaian terhadap perangkat desa Desa Tontoauan kecamatan Luwuk memperlihatkan adanya indeks sangat puas sebesar 37% dalam mengikuti proses sosialisasi yang dilakukan oleh tim, kemudian pada posisi 60% merasa puas dengan adanya program ini. Di sisi lain terdapat persepsi kurang puas 1% dan tidak puas 1%.



Hal ini dikaji lebih lanjut dikarenakan sebagian merasa waktu melakukan program tersebut kurang panjang, selain dari sisi waktu adalah masih ada kurangnya keefektifan dalam memberikan materi pelatihan dari sisi penyajiannya kurang variatif sehingga sedikit memunculkan kejenuhan.

KESIMPULAN

Hasil yang menunjukkan kemampuan pemahaman dan sikap dari para perangkat desa rata-rata sebesar 3,5 terkait indikator-indikator yang menjadi acuan dalam pemahaman mengenai *e-government* sebagai alat bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dari sisi penilaian terhadap kepuasan penerimaan materi selama sosialisasi oleh perangkat Desa Tontoauan Kecamatan Luwuk memperlihatkan adanya indeks sangat puas sebesar 37% dalam mengikuti proses sosialisasi yang dilakukan oleh tim, kemudian pada posisi 60% merasa puas dengan adanya program ini. Dengan tereselainya kegiatan Pengabdian masyarakat ini diharapkan Pemerintah Desa Tontouan mampu mengaplikasikan kegiatan Pemerintahan desa berbasis Teknologi baik dari aspek pelayanan administrasi maupun aspek pengelolaan administrasi pemerintahan di desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana dengan menggunakan dana yang bersumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Luwuk melalui kegiatan pendampingan magang mahasiswa yang biasa disebut KKP (Kuliah Kerja Praktek), Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tahun Akademik 2020/2021. Selain itu, Pihak Universitas Muhammadiyah Luwuk dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2019) 'the Role of Community Empowerment Carried Out By Village Government in the Regional Autonomy Era', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), p. 34. doi: 10.25134/unifikasi.v6i1.1483.
- Akbar Indrawan Saudi1, Taufik Hidayat B.2, R. I. K. (2020) 'Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Di Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar', *Minda Baharu*, 4(2), pp. 87–98. doi: 10.33373/jmb.v4i2.2690.
- Ilham Zitri, Rifaid, Darmansyah, Ayatullah Hadi, A. S. (2022) 'Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik', *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), pp. 125–131. Available at: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>.
- Salahudin, S. (2016) 'Ringkasan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Tahun Ke 1 (2016) dari Rencana Tiga Tahun Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Ber', (September).
- Setiadi, S., Ekawati, H. and Habib, F. (2020) 'Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi



Pembangunan', *Bakti Budaya*, 3(2), p. 149. doi: 10.22146/bb.60463.
Sosiawan, E. A. (2008) 'Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia', *Seminar Nasional Informatika*, 2008(semnasIF), pp. 99–108.